BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mempunyai angka kelahiran cukup tinggi serta kepadatan penduduk yang cukup padat. Ketika masyarakat dihadapkan dengan peristiwa yang tidak diinginkan, mereka menyadari bahwa kehidupannya saat ini menimbulkan sebuah kekhawatiran. Setiap tindakan manusia mendatangkan peristiwa yang berisiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian akibat terjadinya suatu bahaya, namun kepastian terjadinya serta waktu terjadinya tidak diketahui terlebih dahulu.¹ Risiko yang tidak pasti akan datang ini membuat banyak orang yang menginvestasikan asetnya. Salah satunya strategi yang digunakan masyarakat ialah jasa asuransi. Jadi, risiko yang tidak diketahui kapan terjadi menyebabkan banyak masyarakat yang menginvestasikan asetnya guna meminimalisir berbagai risiko yang mungkin dapat terjadi. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Meningkatnya permintaan masyarakat untuk mendaftarkan harta kekayaannya pada perusahaan asuransi menyebabkan perusahaan asuransi saling bersaing menawarkan produk yang beragam, mulai dari asuransi kerugian, tenaga

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung , 2015, hlm. 117-118.

kerja, kesehatan, dan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi pendidikan. Perusahaan asuransi merupakan lembaga pemindahan risiko yang memungkinkan setiap orang mengalihkan kemungkinan timbulnya kerugian pada pihak lainnya. Perannya ialah sebagai lembaga pelimpahan risiko dan mempunyai kewajiban menanggung risiko-risiko yang dialihkan padanya serta berhak mendapatkan pembayaran premi dari tertanggung. Sementara itu, tertanggung berkewajiban melakukan pembayaran premi serta mempunyai hak untuk menerima kompensasi apabila terjadi kerugian terkait aset yang diasuransikannya.

Pelimpahan risiko ini dapat dilaksanakan melalui perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Berdasarkan aturan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi pembuatannya haruslah tertulis berbentuk akta yang dinamakan polis yang berperan sebagai alat pembuktian guna menyebutkan adanya perjanjian di antara pihak penanggung dengan tertanggung. Oleh sebab itu, isi polis haruslah jelas serta tidak mengandung kalimat yang memungkinkan adanya penafsiran berbeda, karena dapat membuat kedua pihak kesulitan dalam menegakkan hak dan kewajibannya untuk menjalankan asuransi. Selain itu, polis juga harus memuat perjanjian tentang persyaratan serta janji-janji khusus sebagai landasan dalam memenuhi hak maupun kewajiban terhadap pencapaian tujuan asuransi tersebut. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) berbunyi:

“Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan

pelindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain”.

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak asuransi atas telah dibayarnya suatu premi maka pihak tertanggung sebagai pemegang polis telah melakukan kewajibannya dan berhak mendapatkan klaim atas polis yang dibayarnya. Perlindungan hukum pada pemegang polis diatur dalam Pasal 52 ayat

(1) UU Perasuransian yakni:

“Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya”.

Perekonomian Indonesia saat ini tengah dalam keadaan tidak baik. Memburuknya kondisi perekonomian tidak menghalangi perusahaan asuransi untuk tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak kreditur apabila suatu perusahaan memiliki utang. Ketika masalah terkait utang timbul, di mana pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya pada beberapa kreditur, maka debitur itu dapat diajukan permohonan dan memasuki suatu keadaan pailit. Pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yang berbunyi: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Sesudah putusan pailit dikeluarkan, maka yang dijatuhkan pailit langsung berdampak hilangnya hak

kepengurusan maupun penguasaan hartanya. Maka dari itu, konsekuensinya menyebabkan aset debitur sudah termasuk dalam harta pailit semenjak putusan itu dikeluarkan.²

Perusahaan asuransi haruslah berbentuk perseroan terbatas, koperasi, ataupun usaha bersama (Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian). Sebuah perusahaan memerlukan suatu organisasi yang mampu mengatur serta manajemen berjalannya perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan memerlukan pekerja untuk menjalankan teknis tersebut. Pekerja merupakan tiap individu yang bekerja untuk mendapatkan gaji berbentuk lainnya. Tanpa kehadiran pekerja, maka dipastikan perusahaan akan sulit untuk menjalankan perusahaannya. Untuk melindungi pekerja yang kedudukannya lebih rendah dibanding pengusaha, sehingga dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sudah dimuat pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) dan kini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pengganti Cipta Kerja). Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Pengganti Cipta Kerja yang menyatakan: “Dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

²Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 283.

Kegagalan dalam membayar dua produk asuransi oleh PT Asuransi Jiwa Kresna Life berupa Asuransi Jiwa Kresna Link Investa Investa (K-LITA) serta Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna Kresna (PIK). Putusan tersebut telah dikeluarkan pemegang polis pada 14 Mei 2020 melalui surat No.017/KL-DIR/V/2020.³ Terdapat kendala likuiditas portofolio investasi karena krisis ekonomi serta pasar modal Indonesia yang dialami PT Asuransi Jiwa Kresna Life. Situasi itu menyebabkan PT Asuransi Jiwa Kresna Life menunda klaim nasabah. Permohonan pengajuan PKPU disetujui melalui putusan No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Namun, pada akhirnya lepas dari status PKPU karena Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pailit dengan putusan No.647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Keadaan pailit tersebut menimbulkan kekhawatiran pada nasabah selaku pemegang polis atas premi yang sudah jatuh tempo, dan terhadap pekerja yang belum menerima upah atau pesangon karena setelah adanya putusan pailit terdapat kurator yang mengatur seluruh sisa aset perusahaan serta pembayaran polis tentu tidak optimal.

Kepailitan mengenal tiga jenis golongan kreditur, di antaranya kreditur separatis, preferen serta konkuren. Golongan pertama ialah kreditur separatis, yaitu pihak yang menjamin utang berupa hipotik, hak gadai, fidusia serta hak tanggungan.⁴ Golongan kedua ialah kreditur preferen, yaitu pihak yang berhak

³Herdaru Purnomo, “*Ramai Lagi! Kresna Life Gagal Bayar Dua Produk Asuransinya*”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200519023553-17-159403/ramai-lagi-kresna-life-gagal-bayar-dua-produk-asuransinya>, Diakses pada tanggal 25 April 2023, pukul 10.00 WIB

⁴Muanir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 97.

mendahului dikarenakan sifat piutang yang diberikan kedudukan khusus oleh undang-undang.⁵ Kreditur preferen mempunyai kedudukan yang istimewa karena mempunyai hak untuk melunasi lebih awal terkait hasil penjualan harta pailit. Golongan kreditur preferen dimuat dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), Pasal 1134 KUH Perdata, Pasal 1139 KUH Perdata, dan Pasal 1149 KUH Perdata. Selanjutnya, ialah golongan kreditur konkuren yang bukan golongan kedua kreditor lainnya. Golongan kreditur konkuren ini tidak mempunyai jaminan khusus terhadap piutangnya, sehingga dari undang-undang tidak menerima hak khusus.

Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: “sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit”. Terkait pernyataan itu, jika debiturnya tidak mampu membayarkan gaji, pesangon, ataupun hak lainnya yang terutang kepada pekerjanya, maka kewajiban-kewajiban tersebut termasuk dalam harta pailit, kemudian pekerja tersebut tergolong kreditur pailit. Tetapi, jika melihat ketentuan tersebut tidak menerangkan secara rinci terkait status pekerja sebagai salah satu kreditur pailit. Akibatnya, pembayaran terhadap upah pekerja belum mendapatkan kejelasan terutama terkait urutan prioritas dalam memenuhi hak pekerja.

⁵Nien Rafles Siregar, “*Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998>, Diakses pada tanggal 05 Januari 2023, pukul 08.00 WIB.

Perusahaan asuransi yang oleh Pengadilan Niaga diputuskan pailit, menyebabkan hilangnya hak pengusaan serta pengurusan aset debitur yang tergolong pailit terhitung semenjak dinyatakan pailit. Akibatnya, wewenang dalam mengelola harta pailit berpindah pada kurator yang diawasi hakim pengawas. Suatu putusan pailit bisa dilaksanakan lebih awal walaupun ada langkah hukum yang disampaikan pada keputusan tersebut.⁶ Pernyataan tersebut dimuat dalam Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatakan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Pengurusan tersebut maknanya ialah melakukan tugas administrasi, mengurus harta pailit, melakukan penjual pemberesan atas harta pailit.

Perusahaan asuransi yang dijatuhi putusan pailit adalah suatu hal yang tidak diinginkan, baik terhadap pihak perusahaan, pemegang polis, dan pekerja. Kepailitan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pemegang polis atas premi yang sudah dibayarkan tetapi belum bisa ditagihkan, yang sudah masuk tenggang ataupun yang sedang berlangsung. Selain pemegang polis, pekerja juga mengalami kekhawatiran akan upah maupun hak lainnya yang belum didapatkan. Merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian terkait perusahaan asuransi dipailit ataupun dilikuidasikan sehingga pemegang polisnya memiliki hak atau status lebih tinggi dibanding hak pihak lain atas pembagian harta kekayaan. Namun, jika merujuk ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU Pengganti Cipta Kerja, terkait perusahaan

⁶Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013. hlm. 45.

dipailitkan ataupun dilikuidasi maka pekerja memiliki hak yang didahulukan pembayarannya. Ketentuan dari pasal tersebut dapat dilihat adanya konflik norma di antara aturan yang mengatur hal serupa, yakni tentang hak terhadap aset pailit perusahaan sehingga apabila terjadinya kepailitan, maka terjadi ketidakpastian hukum terhadap pemegang polis dan pekerja dari suatu perusahaan yang mengalami kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dilakukan kajian lebih mendalam untuk dijadikan karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul “Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi”.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, penulis merumuskan permasalahan di antaranya:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang polis dengan pekerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah pengaturan tentang perlindungan terhadap pemegang polis dengan pekerja telah memberikan perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan hukum pemegang polis dengan pekerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pengaturan tentang perlindungan terhadap pemegang polis dengan pekerja telah memberikan perlindungan hukum atau sebaliknya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk setiap pembacanya. Manfaat tersebut dibedakan menjadi dua, di antaranya:

1. Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini mampu menunjukkan kontribusi penulis terhadap perkembangan hukum perdata secara umum, hukum asuransi serta hukum kepailitan secara khusus mengenai kedudukan pemegang polis dan pekerja apabila terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi solusi bagi konsumen ataupun calon konsumen polis asuransi yang membeli polis asuransi di Indonesia, dan dapat menjadi solusi bagi pekerja pada perusahaan asuransi guna meminimalkan timbulnya perselisihan ataupun menghadapi perselisihan serupa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan untuk memudahkan memahami maksud penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman makna, serta mencegah beragam perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, penulis memberi batasan konsep ataupun definisi yang ada dalam skripsi ini, di antaranya:

1. Perlindungan Hukum

Setiono berpendapat, perlindungan hukum merupakan perbuatan perlindungan kepada masyarakat atas perbuatan menyimpang dari penguasa yang tidak mengikuti aturan guna menciptakan ketentraman maupun ketertiban sehingga

mereka bisa menikmati martabatnya.⁷ Pada hakikatnya perlindungan hukum menggambarkan bagaimana berfungsinya hukum terhadap pencapaian tujuan hukum seperti adil, kebermanfaatan serta kepastian hukum.⁸

2. Asuransi

R. Subekti berpendapat bahwa pertanggungan ataupun asuransi merupakan perjanjian di mana penanggung mengikatkan dirinya pada tertanggung untuk mendapatkan premi guna menggantikan kerusakan, kerugian ataupun hilangnya keuntungan yang kemungkinan terjadi dikarenakan kejadian tidak terduga.⁹ Oleh sebab itu, pandangan penulis terkait asuransi ialah perjanjian di antara penanggung dengan tertanggung, di mana tertanggung mengalihkan risiko yang belum pasti melalui pembayaran premi pada penanggung.

3. Klaim Asuransi

Menurut Sri Handayani, klaim asuransi merupakan permintaan yang diajukan oleh pihak tertanggung sebagai konsumen asuransi terhadap perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung agar tertanggung bisa mendapatkan pembayaran atas ganti rugi akibat terjadinya musibah yang dialaminya.¹⁰

4. Pemegang Polis

⁷Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁸Futri Wisma Hayati, M. Hosen, dan Lili Naili Hidayah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-undangan*”, *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 1 No. 1, 2020, hlm. 82.

⁹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 17.

¹⁰Sri Handayani, “*Pengaruh Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Pencapaian Target Penjualan Produk Asuransi AJB Bumiputera 1912 Cabang Bengkulu*”, *Ekombis Review*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm. 79.

Pasal 1 angka 22 UU Perasuransian yang berbunyi:

“Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain”.

5. Pekerja

Menurut Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan berbunyi: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

6. Kepailitan

Menurut Memorie Van Toelichting, “kepailitan merupakan penyitaan sesuai hukum terhadap semua harta kekayaan pihak berutang untuk kepentingan yang mengutangkan”.¹¹ Berdasarkan definisi tersebut, pandangan penulis terkait kepailitan adalah adanya suatu sitaan kekayaan pada debitur yang dijatuhi pailit oleh pengadilan niaga karena ketidakmampuan dalam membayarkan utangnya.

Dari uraian konsep di atas, sehingga yang dimaksud definisi judul skripsi ini adalah “Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi”.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai suatu sarana, hukum dibentuk untuk mengatur hak, kewajiban, serta sarana untuk melindungi subjek hukum. Perlindungan hukum terhadap

¹¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.16.

rakyat adalah konsep universal dalam arti telah diadopsi serta dilaksanakan tiap negara yang menganggap dirinya sebagai negara hukum.¹² Negara yang menganut sistem negara hukum tentunya mengedepankan perlindungan hukum bagi tiap warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan usaha yang dilaksanakan pemerintah melalui sejumlah aturan sehingga warga negaranya dapat hidup dengan aman dan tenang.

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa usaha mengatur beragam kepentingan masyarakat agar tidak terjadinya perselisihan serta bisa dinikmati seluruh hak yang diakui hukum disebut sebagai perlindungan hukum. Dalam hal ini, pengorganisasian dilaksanakan melalui memberi batasan kepentingan tertentu serta memberi yang lainnya dengan terukur.¹³ Perlindungan hukum haruslah sesuai tahap. Artinya, hal tersebut datang dari ketentuan-ketentuan hukum serta seluruh aturan yang diberi oleh masyarakat, di mana hakikatnya ialah persetujuan guna mengurus hubungan sikap di antara anggota masyarakat atau di antara individu, di mana pemerintah bertindak sebagai wakil kepentingan masyarakat. Kemudian Philipus M. Hadjon berpendapat bahwasannya perlindungan hukum merupakan suatu langkah untuk melindungi subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum. Menurutnya, perlindungan hukum tersebut terbagi dua bentuk yakni preventif serta represif.

2. Teori Kepastian Hukum

¹²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 267.

¹³Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 53-54.

Ketidakpastian hukum dapat membuat hilangnya makna, karena tidak bisa dijadikan pedoman lagi terhadap tingkah laku tiap orang. Kepastian tersebut merupakan bagian dari tujuan hukum. Sudikno Mertkusumo berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwasannya hukum dilaksanakan, dan mempunyai hak berdasarkan hukum akan mendapatkan haknya, serta putusan dapat dijalankan.¹⁴ Untuk mewujudkannya membutuhkan syarat yang berkaitan terhadap struktur internal dari norma hukum tersebut.¹⁵ Syarat tersebut meliputi:

- a. Kejelasan konsep yang diterapkan. Norma hukum memuat uraian tentang perilaku tertentu, yang selanjutnya terangkum dalam konsep-konsep tertentu.
- b. Kejelasan hierarki kewenangan lembaga yang membuat aturan perundang-undangan.
- c. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan dari beberapa aturan perundang-undangan mengenai suatu subjek tertentu dan tidak saling bertentangan.¹⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis terkait dengan skripsi ini, ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai kesamaan maupun perbedaan dengan topik penelitian, di antaranya:

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan dan Perbedaan	Kesimpulan
1	Analisis kedudukan	1. Bagaimana kedudukan	Persamaan dalam penelitian ini	Hasil analisis penelitian ini adalah

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

¹⁵Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

¹⁶*Ibid*, hlm. 39.

<p>pekerja dan pemegang polis dalam hal terjadi kepailitan pada perusahaan asuransi. Oleh Wahyu Andi Asmara, Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.</p>	<p>hukum pegawai perusahaan asuransi dengan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan?</p> <p>2. Bagaimana pemenuhan hak atas harta pailit yang berkeadilan bagi pegawai asuransi</p>	<p>adalah sama-sama membahas kedudukan pekerja dan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan.</p> <p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah berfokus pada kedudukan pekerja dan pemegang polis menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013.</p>	<p>putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUUXI/2013 memberikan perbedaan kedudukan antara upah dan hak-hak lainnya. Upah pekerja dapat mendahului kreditur separatis dan pemegang polis, putusan MK memberikan efek positif terhadap upah pegawai dengan memposisikan pembayaran upah pekerja lebih utama dari semua jenis tagihan.</p>
--	---	--	--

		yang mengalami kepailitan?		
2	Kedudukan hukum pemegang polis dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. Oleh Mohammad Sayudha Patria, Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.	1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang polis di dalam perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit? 2. Bagaimana perlindungan hukum pemegang polis atas perusahaan asuransi	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah berfokus pada kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang	Hasil penelitian ini adalah dalam menyelesaikan pertentangan atas norma UU Perasuransian, UU Kepailitan dan PKPU, serta KUH Perdata diperlukan asas <i>Lex Posteriori Derogat Legi Priori</i> , yaitu ketentuan mengenai undang-undang yang baru mengesampingkan ketentuan undang-undang yang lama. Maka diutamakan

		yang dinyatakan pailit?	mengalami kepailitan.	memakai UU Perasuransian.
--	--	-------------------------------	--------------------------	------------------------------

Perbedaan dalam penelitian ini di mana penulis berfokus kepada kedudukan hukum pemegang polis sebagai kreditur dengan pekerja berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia saat ini, dan apakah dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan pekerja yang ada pada saat ini telah memberikan perlindungan hukum atau sebaliknya. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dan mendukung penelitian yang sudah ada jika di kemudian hari ada hasil yang hampir sama ataupun serupa baik objek maupun subjeknya.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang hendak dibahas, maka metode penelitian penulisan skripsi ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang diterapkan penulis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal serta dogmatik.¹⁷ Yuridis normatif merupakan penelitian yang dilaksanakan melalui analisis, pengkajian, penafsiran aturan hukum yang berlaku. Jenis penelitian tersebut digunakan sebab sesuai dengan peranan ilmu hukum normatif yang

¹⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 94.

menggambarkan, mensistemasikan, menginterpretasikan, mengevaluasi, serta menganalisa hukum positif berdasarkan gejala hukum lainnya, di mana dalam penelitian ini merupakan hukum positif tentang pemegang polis, pekerja, kepailitan, dan hubungannya dengan gejala hukum yang timbul dalam masyarakat.¹⁸

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan perundang-undangan

Pelaksanaannya melalui mengkaji seluruh aturan perundang-undangan yang relevan terhadap persoalan hukum. Biasanya, pendekatan ini diterapkan guna menyelidiki peraturan perundang-undangan di mana penormannya masih memiliki kelemahan pada tingkat teknis ataupun dalam implementasi dalam lapangan.¹⁹

b. Pendekatan konseptual

Pelaksanaannya melalui mengkaji pandangan dalam ilmu, konsep serta asas hukum yang berhubungan terhadap permasalahan hukum yang tengah dialami.²⁰

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Kajian pada penelitian ini memuat peraturan yang sifatnya kepustakaan.

Bahan hukum tersebut mencakup:

a. Primer

¹⁸Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 80-81.

¹⁹Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 133-134.

²⁰*Ibid*, hlm. 148.

Didefinisikan sebagai bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

b. Sekunder

Didefinisikan sebagai bahan yang bukanlah berupa dokumen resmi dan memuat keterangan mengenai bahan hukum primer meliputi buku, jurnal ilmiah yang berkaitan, dan memudahkan menyelesaikan masalah yang dikaji.²¹

c. Tersier

Bahan hukum tersier menunjukkan ataupun menjelaskan tentang kedua bahan hukum sebelumnya berupa kamus hukum, KBBI, kamus

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 181.

bahasa Inggris, serta ensiklopedia yang ada kaitannya terhadap penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Pelaksanaannya melalui proses menganalisis, menafsirkan serta menyimpulkan berdasarkan masalah yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, kemudian menjelaskannya secara tertulis. Penafsiran yang diterapkan di antaranya:

a. Penafsiran autentik

Didefinisikan sebagai penafsiran yang telah diatur oleh ketentuan hukum.

b. Penafsiran sistematis

Didefinisikan sebagai penafsiran yang dilaksanakan melalui memeriksa satu pasal dengan pasal lain dalam aturan perundang-undang dan/atau dalam ketentuan lainnya.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini tersusun atas empat bab yang dibagi lagi menjadi subbab. Isi dari skripsi ini berupa:

Bab 1 Pendahuluan

Memuat penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum

Adapun dalam bab ini membahas mengenai beberapa tinjauan umum seperti asuransi, pekerja, serta kepailitan.

Bab III Pembahasan

Adapun yang dibahas dalam bab ini sesuai dengan perumusan masalah mengenai kedudukan hukum pemegang polis dengan pekerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun peraturan tentang perlindungan hukum atas pemegang polis dengan pekerja.

Bab IV Penutup

Memuat kesimpulan hasil penelitian berupa jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan, dilanjutkan dengan saran yang relevan dengan masalah yang dikaji.